

Dinamika identitas nasional di era globalisasi: kolaborasi pendidikan dan agama

Muhammad Fauzi Daroini

Program Studi Manajemen/Jurusan Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: fauzinew333@gmail.com

Kata Kunci:

Identitas Nasional; Era Globalisasi; Pendidikan Integratif; Moderasi Beragama; Ulul Albab; Pancasila.

Keywords:

National Identity; Globalization Era; Integrative Education; Religious Moderation; Ulul Albab; Pancasila.

ABSTRAK

Gelombang globalisasi menghadirkan tantangan eksistensial yang berisiko melunturkan identitas nasional Indonesia melalui dominasi budaya asing, perubahan orientasi ideologi, serta lanskap digital yang memicu polarisasi masyarakat. Usaha untuk mempertahankan jati diri bangsa ini tidak bisa hanya bertumpu pada supremasi hukum, melainkan membutuhkan langkah antisipatif lewat pendidikan karakter dan penanaman nilai agama sedari dini. Studi ini bertujuan untuk mengkaji peran penting pendidikan integratif dan moderasi beragama dalam memperkokoh identitas kebangsaan, dengan menjadikan model pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai rujukan. Menggunakan metode kualitatif-deskriptif berbasis studi

kepuustakaan, penelitian ini menganalisis berbagai literatur mengenai dampak globalisasi serta alternatif solusinya. Hasil kajian mengindikasikan bahwa transformasi menuju pendidikan integrative seperti yang diwujudkan lewat metafora kurikulum "Pohon Ilmu", penciptaan profil Ulul Albab, dan perpaduan sistem Ma'had (asrama) dengan kampus terbukti efektif menjaga rasionalitas dan kedalaman spiritual generasi muda dari kemerosotan moral. Selain itu, penanaman moderasi beragama (Nasionalisme Religius) dan aktualisasi nilai Pancasila menjadikan agama sebagai fondasi etis dalam merawat kemajemukan. Sebagai simpulan, kolaborasi yang solid antara institusi pendidikan, keluarga, dan lingkungan sosial merupakan syarat mutlak untuk mencetak generasi penerus yang kompetitif di tingkat global namun tetap memegang teguh kearifan lokal Nusantara.

ABSTRACT

The wave of globalization presents existential challenges that risk eroding Indonesia's national identity through the dominance of foreign cultures, shifts in ideological orientation, and a digital landscape that triggers social polarization. Efforts to defend the nation's identity cannot rely solely on the supremacy of law; they require anticipatory measures through character education and the instillation of religious values from an early age. This study aims to examine the crucial role of integrative education and religious moderation in fortifying national identity, using the educational model at the State Islamic University (UIN) of Maulana Malik Ibrahim Malang as a reference. Employing a qualitative-descriptive method based on literature review, this research analyzes various literature on the impacts of globalization and its alternative solutions. The findings indicate that the transformation towards integrative education as materialized through the "Tree of Knowledge" curriculum metaphor, the creation of the Ulul Albab profile, and the integration of the Ma'had (dormitory) system with the campus has proven effective in safeguarding the rationality and spiritual depth of the younger generation from moral degradation. Furthermore, instilling religious moderation (Religious Nationalism) and actualizing Pancasila values position religion as the ethical foundation in nurturing plurality. In conclusion, solid collaboration among educational institutions, families, and the social environment is an absolute prerequisite for producing a future generation that is globally competitive yet firmly holds onto the local wisdom of the archipelago.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Era globalisasi telah membawa perubahan struktural yang masif dalam sejarah peradaban manusia. Dunia masa kini saling terhubung melintasi batas-batas negara, baik di sektor ekonomi, sosial-budaya, politik, maupun teknologi. Ditandai oleh konektivitas tanpa batas dan laju digitalisasi yang melesat cepat, globalisasi tidak hanya mengintegrasikan pasar global, tetapi juga menghadirkan ancaman nyata bagi kedaulatan identitas suatu negara. Fenomena ini merupakan ujian berat bagi bangsa Indonesia dalam mempertahankan jati dirinya di tengah arus perubahan zaman, khususnya bagi generasi muda yang kelak memegang tongkat estafet kepemimpinan. Bagi Indonesia sebuah negara yang didirikan di atas fondasi kemajemukan suku, agama, bahasa, dan tradisi globalisasi ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, ia membuka jalan lebar bagi inovasi sains, kemajuan teknologi, dan demokratisasi informasi. Namun di sisi yang berlawanan, derasnya arus informasi tersebut turut membawa masuk hegemoni budaya asing, pergeseran ideologi, serta gaya hidup kosmopolitan yang secara perlahan dapat mengikis akar kebudayaan lokal dan nilai-nilai luhur bangsa.

Dalam konstelasi global yang semakin memudar batas-batasnya ini, benteng pertahanan paling esensial bagi sebuah bangsa tidak lagi hanya bergantung pada kekuatan militer atau penjagaan teritorial. Pertahanan yang paling krusial justru bertumpu pada ketahanan identitas nasional yang terinternalisasi secara kuat dalam kognisi, afeksi, dan tindakan setiap warga negaranya. Pada hakikatnya, identitas nasional adalah kesadaran kolektif yang dirajut dari perjalanan sejarah, akumulasi budaya, filosofi hidup, serta norma-norma yang membedakan Indonesia dari bangsa lain. Identitas ini bukan sebatas atribut artifisial, melainkan pilar kohesi sosial, penegak wibawa negara di ranah internasional, sekaligus perisai dari efek destruktif modernitas seperti individualisme akut, sekularisme radikal, dan konsumerisme berlebih. Menghadapi dinamika yang serba kompleks ini, pendekatan yang hanya bersandar pada instrumen hukum formal dinilai tidak lagi memadai jika tidak dibarengi oleh pendidikan karakter yang terstruktur sejak dini. Pendidikan dan agama diakui sebagai dua entitas sosial yang memiliki otoritas moral tertinggi dan daya jangkauan terluas dalam membentuk cara pandang serta kepribadian suatu bangsa.

Lebih jauh ke dalam konteks keindonesiaan, ancaman kultural global ini semakin diperumit oleh krisis moral dan kemanusiaan yang menjadi problematika mendesak. Isu mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan problem klasik yang membekas dalam memori kolektif bangsa sejak masa penjajahan, di mana penindasan terhadap hak-hak dasar manusia kerap terjadi. Pasca-kemerdekaan, tantangan pemenuhan hak asasi tidak serta-merta lenyap, melainkan bertransformasi wujud akibat celah pada sistem penegakan hukum dan rendahnya kedewasaan etis di sebagian elemen masyarakat. Kondisi ini melahirkan ketidakadilan lintas kelas yang pada gilirannya merintang pembangunan karakter nasional dan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi negara. Situasi ini kian meresahkan di era *post-truth*, di mana media sosial kerap memainkan peran paradoksal dengan mengaburkan batas antara fakta empiris dan opini manipulatif. Ironisnya, ikhtiar untuk mengatasi krisis multidimensi ini lewat institusi pendidikan Islam acapkali terbentur oleh dikotomi tradisional antara ilmu

agama dan ilmu sains. Pemisahan yang kaku ini memicu polarisasi pemikiran dan menghambat kebangkitan peradaban Islam. Idealnya, pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan agama berjalan seiring untuk menanamkan wawasan, membentuk moralitas, serta membekali generasi muda agar cerdas sekaligus menjunjung tinggi toleransi. Karena itu, intervensi untuk memperkuat identitas nasional menjadi langkah yang tidak bisa ditunda guna membentengi pemuda dari disorientasi jati diri.

Sinergi yang harmonis antara sistem pendidikan yang mencerahkan akal dan ajaran agama yang menuntun nurani merupakan prasyarat mutlak untuk merekatkan kembali tenun kebangsaan yang mulai terkoyak. Berbagai analisis komprehensif menegaskan bahwa pendekatan yang memadukan kecerdasan intelektual, kematangan emosional, dan kedalaman spiritual adalah kunci utama untuk mencetak generasi yang resilien, adaptif terhadap kemajuan zaman, namun tetap kokoh berpijak pada kearifan lokal. Berpijak pada uraian tersebut, kajian ini disusun untuk membedah secara mendalam konstruksi identitas nasional, memetakan ancaman globalisasi, serta merumuskan strategi penguatan melalui pendidikan terpadu dan moderasi beragama, dengan mengambil rujukan model pendidikan paripurna dari Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak dan tantangan multidimensi dari era globalisasi terhadap eksistensi identitas nasional Indonesia?
2. Bagaimana peran krusial nilai-nilai Pancasila dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam membentengi generasi muda dari degradasi moral?
3. Bagaimana peran kolaboratif dari pendidikan integratif dan tripusat pendidikan (keluarga, sekolah, masyarakat) dalam memperkokoh karakter kebangsaan?
4. Bagaimana fungsi agama khususnya lewat kerangka Nasionalisme Religius dan Moderasi Beragama sebagai benteng pelindung identitas bangsa?
5. Bagaimana praktik keberhasilan implementasi pendidikan integratif (Sains dan Agama) di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai model percontohan penguatan jati diri?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis secara kritis berbagai bentuk ancaman globalisasi yang berisiko menggerus identitas nasional bangsa Indonesia.
2. Memaparkan urgensi penerapan nilai-nilai Pancasila serta HAM sebagai pijakan etis dan moral dalam mendidik karakter generasi muda.
3. Merumuskan konsep dan efektivitas pendidikan integratif dalam membangkitkan kesadaran akan identitas kebangsaan yang tangguh.
4. Menjabarkan peran strategis ajaran agama melalui moderasi dan nasionalisme religious sebagai tameng kultural dari penyusupan ideologi ekstrem maupun sekuler.

5. Menelaah studi kasus (*best practices*) di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terkait sinergi keilmuan umum dan agama dalam melahirkan generasi *Ulul Albab*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur (*library research*). Data diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga anti korupsi, dan artikel terpercaya. Analisis dilakukan dengan cara menelaah teori, membandingkan hasil penelitian terdahulu, dan menarik kesimpulan mengenai relevansi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan anti korupsi.

Hasil dan Pembahasan

Kerangka Teoretis dan Dimensi Identitas Nasional

Membedah anatomi identitas nasional secara utuh sangatlah esensial guna merancang strategi pertahanan kultural yang akurat. Identitas kebangsaan Indonesia bukanlah konsep yang statis dan monolitik, melainkan sebuah mozaik dinamis yang dirajut dari kesepakatan agung para pendiri bangsa. Merujuk pada kajian sosiologis dan konstitusional, jati diri bangsa ini diklasifikasikan ke dalam tiga pilar fondasi:

1. Identitas Fundamental: Menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup (*way of life*) dan falsafah negara yang kedudukannya bersifat mutlak. Dimensi ini berfungsi sebagai jangkar moral serta pedoman etika dalam merumuskan kebijakan hukum, menjalankan pemerintahan, dan menavigasi perilaku social.
2. Identitas Instrumental: Mencakup perangkat konstitusional dan simbolik seperti UUD 1945, Bahasa Indonesia, Bendera Merah Putih, Lambang Garuda, dan Lagu Indonesia Raya. Pilar ini bertindak sebagai alat pemersatu antaretnis, representasi visual kedaulatan di kancah global, serta landasan hukum ketatanegaraan.
3. Identitas Alamiah: Terdiri dari realitas demografis yang sangat plural (ribuan suku, budaya, dan keberagaman agama) yang mendiami wilayah kepulauan raya. Dimensi ini merupakan anugerah yang mengukuhkan doktrin Wawasan Nusantara, menuntut kebijaksanaan pemerataan, dan mensyaratkan toleransi tingkat tinggi.

Tergerusnya salah satu dari pilar-pilar ini dipercaya akan memicu krisis jati diri massal yang berpotensi bermuara pada perpecahan NKRI. Oleh karena itu, penguatan berkesinambungan atas elemen-elemen ini menjadi sebuah keniscayaan di tengah gempuran nilai-nilai transnasional. (Mona Adha & Rika Perdana, n.d.; Zulfa & Ulfatun Najicha, 2022)

Kompleksitas Tantangan di Era Globalisasi

Penetrasi globalisasi memunculkan sebuah paradoks: ia berhasil meruntuhkan sekat geografis demi efisiensi ekonomi dan komunikasi, namun bersamaan dengan itu, ia menciptakan alienasi terhadap budaya lokal dan memicu krisis identitas yang mendalam. Generasi milenial dan Generasi Z, yang lahir dan dibesarkan di ekosistem digital, menempati posisi paling rentan terhadap gempuran budaya luar. Manifestasi

dari krisis identitas ini tergambar dalam beberapa tantangan utama berikut:(Anti Putri et al., 2025)

1. Erosi Kultural dan Hegemoni Gaya Hidup Global: Banjir produk dan budaya pop asing telah menekan eksistensi kearifan lokal. Hal ini terefleksi dari bergesernya selera kaum muda yang kian materialistis. Penggunaan merek asing secara masif bukan sekadar perubahan tren ekonomi, tetapi menandai merosotnya kebanggaan pada produk dalam negeri. Fenomena ini juga tampak dari degradasi penggunaan bahasa daerah dan rusaknya tatanan Bahasa Indonesia akibat pencampuran istilah asing yang berlebihan.
2. Disorientasi Ideologi dan Ancaman Liberalisme: Narasi global kerap mendiktekan bahwa kemajuan identik dengan liberalisme pasar dan sekularisme. Pandangan hegemonik ini mengancam akan menggeser posisi Pancasila. Apabila paham liberal yang menonjolkan kebebasan tanpa batas menggerus tradisi gotong royong, maka kohesi nasional akan berada di ujung tanduk.
3. Disrupsi Digital dan Sindrom Post-Truth: Algoritma platform digital sering kali memenjarakan pengguna ke dalam ruang gema (*echo chambers*) yang hanya mempertegas bias pandangan mereka. Ekosistem ini menyuburkan intoleransi, memfasilitasi penyebaran hoaks, dan memicu agresi siber. Generasi yang minim literasi digital akan dengan mudah terseret dalam arus polarisasi ini.
4. Krisis Kemanusiaan dan Pelanggaran HAM: Merosotnya batas-batas moral di pergaulan modern memunculkan apatisme sosial. Pelanggaran hak asasi di era ini sering kali berakar dari hilangnya empati dan maraknya egosentrisme. Fanatisme buta terhadap golongan tertentu acapkali membuat keadilan kehilangan objektivitasnya.

Pancasila dan Hak Asasi Manusia: Fondasi Moral Bangsa

Menghadapi ragam ancaman tersebut, kita tidak bisa hanya bernostalgia. Pancasila harus diaktualisasikan sebagai instrumen operasional dan landasan etis dalam pendidikan karakter bangsa. Namun, melindungi hak asasi manusia tidak akan optimal jika hanya mengandalkan ancaman pidana; hal tersebut mensyaratkan fondasi moral yang disemai melalui pendidikan. Setiap sila dalam Pancasila sejalan dengan prinsip HAM universal sekaligus sangat menghargai kearifan lokal:(Fauzia & Hamdani, 2021; Musataklima et al., 2023)

1. Sila Pertama: Membangun kesadaran bahwa martabat manusia merupakan anugerah Tuhan, sehingga menindas hak orang lain adalah wujud pengingkaran beragama. Sila ini menjamin kemerdekaan fundamental untuk berkeyakinan.
2. Sila Kedua: Mewajibkan perlakuan yang setara, adil, dan beradab terhadap sesama, serta menolak secara tegas segala bentuk diskriminasi, rasisme, dan perundungan.
3. Sila Ketiga: Memaknai persatuan melalui penghargaan terhadap kebhinnekaan, serta melindungi kelompok minoritas demi menghindari marginalisasi yang memicu separatisme.

4. Sila Keempat: Mengedepankan hak sipil dan kemerdekaan berpendapat yang disalurkan lewat tradisi musyawarah mufakat, menolak cara-cara otoritarian.
5. Sila Kelima: Mengharuskan kehadiran negara dalam memastikan keadilan ekonomi dan akses kesejahteraan, guna mencegah ketimpangan kelas yang membahayakan persatuan.

Transformasi Pendidikan Integratif: Pilar Penyangga Jati Diri

Model pendidikan ortodoks yang memisahkan antara keilmuan sekuler dan ajaran agama terbukti telah usang. Reformasi menuju paradigma pendidikan yang memadukan kecerdasan kognitif, kepekaan sosial, dan ketangguhan spiritual secara utuh merupakan kebutuhan yang mendesak. Transformasi ini dapat diwujudkan melalui: (Mar'atur Rosyidah & Mukmin, 2024)

1. Sinergi Tripusat Pendidikan: Keluarga memegang peran sebagai madrasah pertama yang menanamkan afeksi dan toleransi dasar. Institusi pendidikan formal bertugas menyediakan kurikulum yang menghidupkan nalar kritis dan mencegah perundungan. Sementara itu, lingkungan masyarakat bertindak sebagai laboratorium sosial tempat nilai-nilai tersebut diuji dan diawasi pelaksanaannya.
2. Pedagogi Berbasis Kearifan Lokal: Identitas alamiah bangsa dapat dirawat dengan memasukkan budaya lokal ke dalam ruang kelas. Praktik mewajibkan bahasa daerah untuk tata krama, menyisipkan filosofi adat, dan menghidupkan seni serta permainan tradisional terbukti ampuh memulihkan rasa bangga terhadap warisan leluhur.
3. Nasionalisme Digital dan Literasi Media: Menutup pintu dari arus informasi global adalah kemustahilan. Sebagai gantinya, pemuda harus dibekali "nasionalisme digital" yakni nalar kritis untuk memilah informasi dan melawan hoaks. Lebih jauh, mereka harus didorong untuk bermetamorfosis dari sekadar konsumen menjadi kreator konten bernapaskan kebangsaan (seperti *da'i digital*) untuk mempromosikan kerukunan dan budaya Nusantara di dunia maya.

Agama sebagai Kompas: Moderasi dan Nasionalisme Religius

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, agama tidak ditepikan ke ruang privat. Agama justru menjadi kompas moral sesuai amanat Sila Pertama yang memandu etika bernegara. Untuk menghindari jebakan pragmatisme global maupun interpretasi agama yang sempit, diperlukan penanaman dua kerangka konseptual: (Hasan, n.d.)

1. Nasionalisme Religius: Menegaskan bahwa patriotisme dan kesetiaan pada negara tidak berlawanan dengan dogma agama, melainkan merupakan manifestasi dari ibadah itu sendiri. Mengabdikan pada kemanusiaan, melestarikan alam, dan melawan korupsi harus dilihat sebagai bentuk ketaatan spiritual.
2. Moderasi Beragama: Memilih titik keseimbangan dengan menolak ekstremisme radikal yang kaku sekaligus menolak liberalisme amoral. Toleransi yang sejati yakni komitmen meyakini ajaran agama sendiri secara teguh sembari menjamin rasa aman bagi pemeluk agama lain adalah pilar utama penjaga kebhinekaan NKRI.

Model Integrasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Sebuah Referensi

Sebagai purwarupa efektivitas penggabungan sains umum dan agama, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menyajikan cetak biru yang sangat komprehensif: (Riskiyah & Susanti, 2023)

1. **Metafora Pohon Ilmu:** Kurikulum didesain dengan landasan bahwa semua ilmu berasal dari Tuhan.
 - a) *Akar:* Penguasaan ilmu alat seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, filsafat, dan dasar-dasar keislaman.
 - b) *Batang:* Penguasaan metode penelitian saintifik yang bermoral.
 - c) *Cabang:* Ragam ilmu terapan (seperti kedokteran atau teknik) yang dijiwai etika ketuhanan.
 - d) *Buah:* Menghasilkan sarjana yang tangguh imannya, tajam analisisnya, dan berdedikasi menciptakan inovasi bagi rakyat.
2. **Pencetakan Karakter Ulul Albab:** Konsep manusia paripurna yang menggabungkan kemahiran profesional dengan ketakwaan ulama. Dibangun di atas fondasi *Dzikir* (kesadaran spiritual), *Fikir* (kematangan intelektual), dan *Amal Shalih* (kontribusi nyata), lulusannya didesain untuk memiliki kedalaman spiritual, akhlak mulia, ilmu yang luas, dan kecakapan profesional.
3. **Ekosistem Ma'had (Asrama):** Mewajibkan mahasiswa tahun pertama menetap di asrama. Ekosistem komunal ini menjadi wadah peleburan berbagai latar belakang etnis yang secara nyata melatih toleransi, menekan ego primordial, dan menghidupkan nilai kebhinekaan secara organis.
4. **Implementasi Moderasi Beragama:** Institusi ini secara progresif merumuskan kebijakan moderasi dengan prinsip melestarikan kearifan tradisi dan mengakomodasi inovasi modern. Bahkan, insersi muatan eko-teologi dan nasionalisme ke dalam silabus berhasil mendongkrak rasa cinta tanah air di kalangan mahasiswa.

Rekomendasi Arah Kebijakan Strategis

1. **Rekonstruksi Kurikulum Nasional:** Mengikis tuntas dikotomi pendidikan sains dan agama dengan mewajibkan insersi muatan moral, etika, dan pendidikan karakter secara terintegrasi di seluruh perguruan tinggi.
2. **Pengembangan Nasionalisme Digital:** Memasukkan literasi siber ke dalam sistem pendidikan untuk menciptakan kekebalan terhadap manipulasi digital, serta memfasilitasi pemuda untuk aktif memproduksi konten positif bernuansa budaya local.
3. **Revitalisasi Budaya Organik:** Menerbitkan kebijakan yang mendorong penggunaan bahasa ibu dan pelestarian seni budaya daerah sedari bangku sekolah dasar.
4. **Sinkronisasi Teologi dan Kebangsaan:** Menyelenggarakan program pengayaan tentang Nasionalisme Religius bagi tenaga pendidik, serta memperluas model

asrama komunal (*boarding school*) di instansi pendidikan guna memupuk toleransi lintas budaya.

5. Pemerataan Keadilan Hukum (HAM): Memastikan pemerintah daerah proaktif merancang kebijakan pro-HAM dengan partisipasi aktif dari kelompok masyarakat sipil untuk mencegah ketimpangan sosial.

Kesimpulan dan Saran

Turbulensi globalisasi, kapitalisme pasar bebas, dan revolusi digital menempatkan ketahanan identitas nasional Indonesia di titik krusial. Merosotnya batas-batas moral, intrusi budaya hegemonik, serta infiltrasi narasi ekstrem mengancam keutuhan tatanan sosial masyarakat. Menghadapi konstelasi ini, pengarusutamaan kembali nilai-nilai luhur Pancasila sebagai panduan etis dan moral adalah keputusan mutlak. Menjaga jati diri bangsa mensyaratkan kolaborasi antara sistem pendidikan yang memantik daya nalar dan pemahaman agama yang inklusif. Pendekatan pendidikan yang utuh yang disokong oleh ekosistem keluarga, sekolah, dan masyarakat madani merupakan jalan keluar dari kebuntuan sistem pendidikan sekuler di masa lalu. Inovasi rekayasa sosial dan akademis yang dijalankan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang melalui paradigma epistemologis "Pohon Ilmu", proyeksi lulusan *Ulul Albab*, serta habituasi toleransi di *Ma'had Al-Jami'ah* memberikan bukti empiris yang valid. Model ini menegaskan bahwa fusi antara sains mutakhir dan kearifan dogma agama bukanlah hal yang utopis. Lewat sistem inilah, Indonesia memiliki peluang emas untuk tidak hanya mencetak kaum teknokrat yang berdaya saing global, namun juga intelektual pejuang yang hatinya terikat pada spiritualitas, keadilan HAM, dan kecintaan abadi pada identitas budayanya.

Daftar Pustaka

- Anti Putri, V. F., Pratiwi, I. H., & Hidayatullah, A. D. (2025). Kritisisme Konstruktif dan Dialog Antar Generasi: Mewujudkan Pancasila yang Relevan di Era Globalisasi. *AREMBEN Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 3(1), 25–34. <https://doi.org/10.69688/aremben.v3i1.117>
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Aktualisasi nilai-nilai pancasila dan konstitusi melalui pelokalan kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah. *Indonesia Berdaya*, 2(2). <https://doi.org/10.47679/ib.2021136>
- Hasan, M. (n.d.). *PRINSIP MODERASI BERAGAMA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA*. Retrieved <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/mubtadii>
- Mar'atur Rosyidah, N., & Mukmin, M. I. (2024). Pengembangan e-Modul Integratif untuk Melatih Literasi Numerasi Materi Peluang pada Kurikulum Merdeka. In *Academic Journal of Math* (Vol. 06, Number 02). <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/arithmetic/index>
- Mona Adha, M., & Rika Perdana, D. (n.d.). Nomor 1, Mei 2021 hal. 6, 10–20. <https://doi.org/10.22219/jch.v6i1.14931>

- Musataklima, M., Syamsudin, M., & Sulistiyono, A. (2023). Konstitusionalisasi Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Profetik Islam. *Jurnal HAM*, 14(2), 137. <https://doi.org/10.30641/ham.2023.14.137-154>
- Riskiyah, R., & Susanti, N. L. (2023). Integrasi Kelslaman Dalam Kurikulum Clinical Skills PSPD Uin Maulana Malik Ibrahim Malang. *Journal of Islamic Medicine*, 7(2). <https://doi.org/10.18860/jim.v7i2.20677>
- Zulfa, A., & Ulfatun Najicha, F. (2022). URGENSI PENGUATAN IDENTITAS NASIONAL DALAM MENGHADAPI SOCIETY 5.0 DI ERA GLOBALISASI. *Jurnal Kalacakra*, 3(2), 65–71. <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/kalacakra/index>